

Kemitraan Penyediaan Air Minum Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Di Kawasan Regional Banjarbakula

Arinda Kartika Sari^{1*}, Tomi Oktavianor²

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

E-mail : fahmi@ulm.ac.id

Article History:

Received: 24 Juli 2026

Revised: 18 Agustus 226

Accepted: 05 September 2026

Keywords: Kemitraan, Air Minum, BPAM Banjarbakula, PDAM, SPAM Regional, Linear Collaborative of Partnership.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kemitraan antara Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kawasan Regional Banjarbakula dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula merupakan bentuk sinergi lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menjawab tantangan keterbatasan sumber air baku dan akses air minum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adapun sumber data diperoleh dari informan, aktivitas atau peristiwa dan dokumen melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjalin antara BPAM Banjarbakula dengan PDAM di Kawasan regional Banjarbakula mengarah pada pola Linear Collaborative of Partnership. Tingkat pemanfaatan SPAM Bajarbakula oleh masing-masing PDAM bervariasi. Kemitraan ini memberikan manfaat berupa peningkatan cakupan pelayanan, efisiensi biaya dan peningkatan kuantitas serta kualitas air minum masyarakat, namun masih dihadapkan pada tantangan teknis, kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, regulasi dan perbedaan kondisi masing-masing PDAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, harmonisasi kelembagaan serta evaluasi berkala terhadap implementasi kerjasama agar keberlanjutan kemitraan dapat terjaga secara optimal.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga menjadi prioritas pemerintahan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan tuntutan kualitas hidup (Rencana Induk SPAM, 2015).

Salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) adalah penyediaan akses air minum yang merata, aman, dan terjangkau, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan lintas-wilayah untuk menjamin ketersediaan layanan tersebut (idntimes.com, 8 Desember 2022). Dalam kerangka desentralisasi, pengelolaan SPAM menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014).

Di Kalimantan Selatan, pembangunan SPAM Regional Banjarbakula (tahap I kapasitas 250 L/detik, tahap II 500 L/detik) merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan air minum bagi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut; pada peresmian tahap dua disebutkan program ini diproyeksikan melayani sekitar 60.000 rumah tangga (Kompas.com, 19 Maret 2023). Pengelolaan teknis SPAM ini dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula yang berstatus UPTD dengan pola BLUD pada Dinas PUPR Provinsi (Peraturan Gubernur Kalsel No.0155/2017; Rencana Induk SPAM, 2015).

Di sisi lain kapasitas terpasang regional mencapai 2.605 L/detik dengan produksi rata-rata 2.204 L/detik (efisiensi produksi $\approx 84,6\%$), masih terdapat kapasitas idle 401 L/detik, kehilangan air yang relatif tinggi (29,4%), dan beberapa kecamatan yang belum tercover layanan PDAM (Rencana Induk SPAM, 2015). Proyeksi kebutuhan hingga 2029 menunjukkan penambahan kebutuhan sekitar 2.889 L/detik, yang menegaskan perlunya strategi pasokan alternatif dan pengelolaan kemitraan yang efektif antar-pihak (Rencana Induk SPAM, 2015). Ketergantungan pada sumber air sungai menghadirkan risiko kesinambungan pasokan dan kualitas, akibat pencemaran dan musim kemarau (Nur Hilalina, 2020; kompasiana.com, 6 Desember 2021). Sebaliknya, Waduk Riam Kanan diidentifikasi sebagai sumber air baku yang memenuhi kriteria Kelas I menurut PP No.82/2002 dan memiliki kapasitas kuantitas yang lebih stabil, sehingga dipandang sebagai alternatif strategis untuk menjaga kontinuitas pasokan (Brahmana & Ahmad, 2018; Saputra *et al.*, 2023).

Secara kelembagaan, sejak 2015 telah ada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula untuk pengembangan SPAM regional—termasuk alokasi pembelian air baku/air curah oleh masing-masing PDAM dan prinsip tarif berbasis pemulihan biaya (full cost recovery) yang ditetapkan oleh Provinsi (dokumen perjanjian 2015; PP No.54/2017). Namun, implementasi perjanjian tersebut belum optimal hingga tahun-tahun terakhir: realisasi distribusi dan pembelian air oleh PDAM tidak sesuai alokasi yang disepakati, bahkan beberapa PDAM belum melakukan pembelian sama sekali (wawancara dengan Wahidah, Kasi Distribusi BPAM Banjarbakula, 4 Feb 2025; wawancara dengan Drs. Suriansyah, Dewan Pengawas BPAM, 4 Feb 2025).

Data lapangan dan wawancara pra-penelitian mengindikasikan sebab-sebab ketidakterlaksanaan perjanjian antara lain: ketersediaan alternatif sumber (mis. sumur atau sungai lokal), perbedaan kebutuhan riil PDAM dibanding alokasi, serta isu kualitas dan kepercayaan terhadap pengaturan tarif dan tata kelola (wawancara, 4 Feb 2025). Kondisi ini menandakan bahwa aspek teknis kapasitas saja tidak cukup; pola kemitraan, insentif ekonomi, alur koordinasi antar-pemda, dan tata kelola institusional memegang peran penting dalam keberhasilan penyediaan layanan air minum regional (Savas, 2000; dokumen perjanjian 2015). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada pola kemitraan antara BPAM Banjarbakula (sebagai penyedia regional) dan PDAM (sebagai pembeli/pengelola layanan di daerah). Pendekatan ini diperlukan untuk memahami bagaimana bentuk kerjasama formal dijalankan, hambatan implementatif yang muncul, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

penyerapan dan keberlanjutan layanan air minum regional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola kemitraan yang terjalin antara BPAM Banjarbakula dan PDAM, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja sama tersebut. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam tata kelola penyediaan air minum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan efektivitas kerja sama penyediaan air minum di wilayah regional.

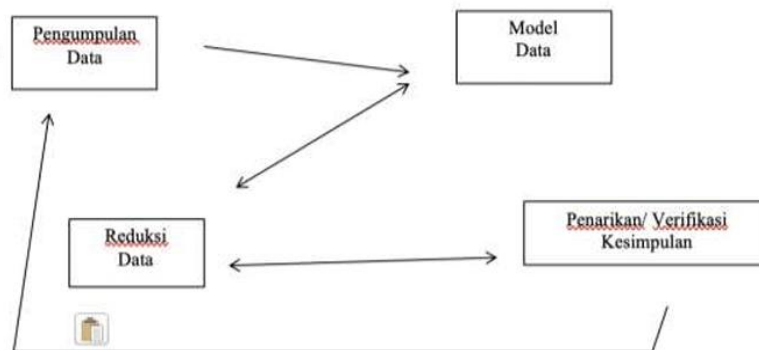
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik yang bertujuan memahami secara mendalam pola kemitraan antara Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam penyediaan air minum di kawasan Regional Banjarbakula (Sugiyono, 2012; Moleong, 2013). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan dinamika kerja sama secara komprehensif melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alami. Penelitian dilaksanakan di Kantor BPAM Banjarbakula, Jalan Pinus 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Fokus penelitian adalah kemitraan antara BPAM Banjarbakula dan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, melibatkan delapan orang yang dianggap memiliki pemahaman mendalam, antara lain kepala BPAM, dewan pengawas, pejabat struktural BPAM, serta perwakilan dari empat PDAM di wilayah Banjarbakula.

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala BPAM Banjarbakula	1 orang
2.	Dewan Pengawas BPAM Banjarbakula	1 orang
3.	Kasubbag Tata Usaha BPAM Banjarbakula	1 orang
4.	Kepala Seksi Distribusi BPAM Banjarbakula	1 orang
5.	Kepala Bagian Produksi dan Perawatan PT. Air Minum Intan Banjar	1 orang
6.	Manager Produksi PT. Air Minum Bandarmasih	1 orang
7.	Kepala Seksi Perencanaan PT. Air Minum Berkah Banua	1 orang
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik PDAM Barito Kuala	1 orang

Tabel 1. Informan Penelitian

Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, dokumen resmi, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap kondisi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (Burhan, 2011), dan dokumentasi dari arsip dan peraturan terkait (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data (penyederhanaan dan pemilihan data penting), penyajian data (penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk naratif atau matriks), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (identifikasi pola, hubungan, dan makna). Ketiga tahap ini berlangsung secara siklus dan berulang hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid.



Gambar 1. Komponen Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kemitraan BPAM Banjarbakula dan PDAM di Kawasan Regional Banjarbakula

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola kemitraan antara Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kawasan Regional Banjarbakula masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. BPAM Banjarbakula sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola dan mendistribusikan air curah lintas kabupaten/kota memiliki kapasitas terpasang 2.605 liter/detik. Namun, penyerapan oleh PDAM belum optimal, bahkan beberapa PDAM belum melakukan pembelian air sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun melalui perjanjian kerja sama sejak tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, pola kemitraan BPAM–PDAM di kawasan Banjarbakula mencakup tiga bentuk utama, yaitu kemitraan koordinatif, kemitraan kontraktual, dan kemitraan kolaboratif.

Berdasarkan temuan penelitian, pola kemitraan BPAM–PDAM di kawasan Banjarbakula mencakup tiga bentuk utama, yaitu kemitraan koordinatif, kemitraan kontraktual, dan kemitraan kolaboratif.

1. Kemitraan Koordinatif terjadi dalam bentuk pertemuan, rapat koordinasi, dan forum komunikasi yang melibatkan pemerintah provinsi, BPAM, dan PDAM. Pola ini penting untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi pelayanan, dan mengevaluasi kinerja pengelolaan SPAM.
2. Kemitraan Kontraktual diwujudkan melalui perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk volume pembelian air curah, tarif berbasis full cost recovery, serta tanggung jawab teknis dan operasional.
3. Kemitraan Kolaboratif ditunjukkan dalam upaya bersama pengembangan infrastruktur SPAM, pemeliharaan jaringan perpipaan, serta perencanaan distribusi air ke wilayah pelayanan.

Namun, implementasi kemitraan ini belum berjalan optimal karena beberapa faktor, seperti perbedaan kebutuhan riil PDAM dibandingkan dengan alokasi air yang telah ditetapkan, ketersediaan sumber air alternatif, serta persoalan kualitas dan tarif air curah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya celah dalam komunikasi, koordinasi, dan kesepahaman antara BPAM dan PDAM.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan

Analisis hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas kemitraan antara BPAM Banjarbakula dan PDAM di kawasan Banjarbakula:

1. Faktor Kelembagaan : Struktur organisasi dan kapasitas kelembagaan BPAM sebagai UPTD berpengaruh terhadap efektivitas kemitraan. Kewenangan BPAM terbatas pada pengelolaan air curah, sementara distribusi dan pelayanan ke pelanggan berada di bawah kewenangan PDAM, yang kadang menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab.
2. Faktor Regulasi dan Perjanjian : Ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, volume pembelian yang disepakati tidak tercapai karena PDAM memiliki alternatif sumber air sendiri atau permintaan yang lebih rendah dari proyeksi.
3. Faktor Teknis dan Operasional : Permasalahan teknis seperti kehilangan air, keterbatasan jaringan distribusi, serta kualitas air baku yang menurun turut mempengaruhi efektivitas kerja sama.
4. Faktor Ekonomi dan Tarif : Kebijakan tarif berbasis full cost recovery yang ditetapkan provinsi menjadi kendala bagi beberapa PDAM karena dinilai terlalu tinggi, sehingga memengaruhi keputusan pembelian air curah dari BPAM.

Implikasi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Ketidakefektifan kemitraan BPAM–PDAM berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di kawasan Banjarbakula. Meskipun kapasitas SPAM regional cukup besar, keterbatasan penyerapan dan distribusi menyebabkan masih adanya wilayah yang belum terlayani secara optimal. Permasalahan ini berpotensi menghambat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada indikator akses air minum aman dan terjangkau. Pola kemitraan yang ideal seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan berbagi risiko. Untuk itu, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan ulang perjanjian kerja sama yang lebih adaptif terhadap kondisi riil, peningkatan kapasitas kelembagaan BPAM, harmonisasi kebijakan tarif, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar pihak. Pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif akan mendorong terciptanya sinergi antara BPAM dan PDAM dalam penyediaan layanan air minum yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kemitraan antara BPAM Banjarbakula dan PDAM di kawasan Regional Banjarbakula berperan penting dalam penyediaan air minum dengan pola Linear Collaborative Partnership, yang menunjukkan hubungan seimbang dan pembagian peran yang jelas: BPAM sebagai penyedia air curah dan PDAM sebagai penyalur ke masyarakat. Meskipun berbeda status kelembagaan, hubungan kerja tetap bersifat sejajar dan kolaboratif. Pemanfaatan SPAM bervariasi; PT. Air Minum Intan Banjar dan Berkah Banua sangat bergantung pada suplai BPAM, sedangkan Bandarmasih menjalin kerja sama sebagai bentuk komitmen regional. PDAM Barito Kuala belum bekerja sama karena infrastruktur masih dalam pembangunan. Tantangan kemitraan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang panjang, pembangunan infrastruktur yang belum tepat sasaran, serta ketergantungan pada skema pendanaan DAK.

REFERENSI

- Antaranews.com. (2023, 27 Juni). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan air minum. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BLUD UPTD BPAM Banjarbakula. (2019). *Rencana Strategi BLUD UPTD BPAM*

- Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan.
- Brahmana, S., & Ahmad, M. (2018). Kualitas Air di Waduk Riam Kanan Kalimantan Selatan. *Jurnal Lingkungan Tropis*, 12(1), 44–53.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. (2020). *Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- Ditjen P2L & PM. (2004). *Pedoman Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BPAM Banjarbakula tahun 2023.
- Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Rajagrafindo Persada*.
- IDN Times. (2022, 8 Desember). Target SDGs dalam Penyediaan Air Minum. Diakses dari <https://www.idntimes.com>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2024. *Buku Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Kalimantan Selatan*. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- Kompas.com. (2023, 19 Maret). Jokowi Resmikan SPAM Banjarbakula Tahap Dua di Kalsel. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kompasiana.com. (2021, 6 Desember). Kualitas Air Sungai di Banjarmasin yang Menurun. Diakses dari <https://www.kompasiana.com>
- Kornita, Sri Endang. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Air Bersih di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 11(2):166-181.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustafa, D. (2017). *Kemitraan Lintas Sektor dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2011). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0117 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Pub. L. No. 0117, 1 (2020).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0155 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Pub. L. No. 0155, 1 (2017).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pub. L. No. 026, 1 (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Saputra, A., dkk. (2023). *Potensi Waduk Riam Kanan dalam Penyediaan Air Minum di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Savas, E. S. (2000). *Privatization and Public-Private Partnerships*. New York: Chatham House Publishers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Afabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Willem, A. et al. (2014). Kemitraan antara PDAM Kab. Semarang dan PT Sarana Tirta Ungaran. Surabaya: ITS Press.

www.intanbanjar.id

www.pambandarmasih.com

www.pdambatola.com

www.ptamberkahbanua.co.id